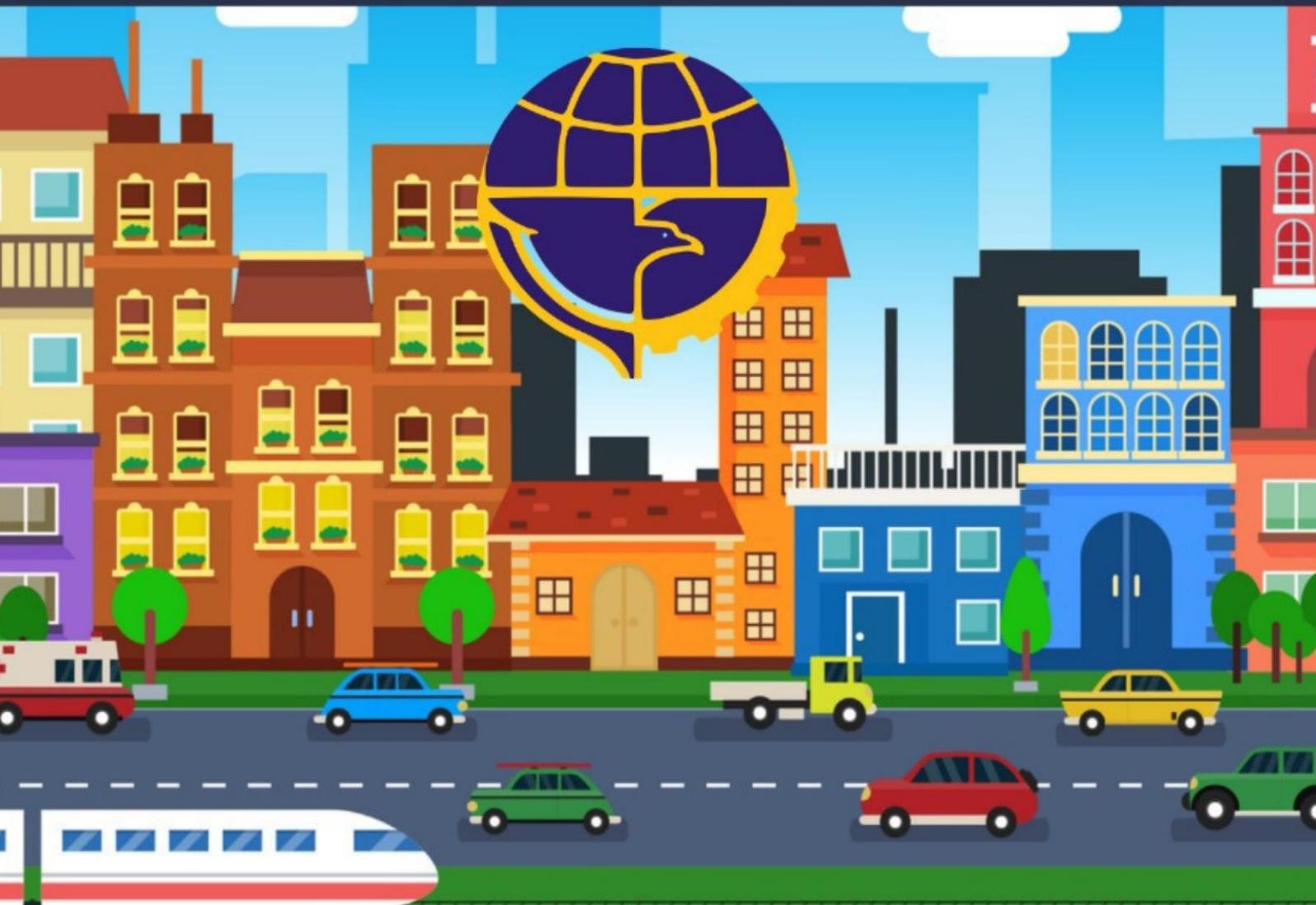


DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

LKjILP

TAHUN 2024



DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kenari No. 110 Telp. (0342) 801989 Fax. (0342) 815441

Situs web : <http://dishub.blitarkota.go.id> E-mail : dishub@blitarkota.go.id

BLITAR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 dengan baik. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 ini merupakan laporan rutin yang disusun setiap tahun sekali, dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Disamping itu LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai serta aspek keuangan yang secara langsung meningkatkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam konteks pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, akan tetapi masih banyak juga permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis

dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang perhubungan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan serta Visi dan Misi Kota Blitar.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Blitar ini, agar dapat bermanfaat untuk bahan referensi pengambilan kebijakan/keputusan dalam menetapkan program dan kegiatan disektor transportasi yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun-tahun mendatang. Kami mengharap saran dan kritik yang membangun unrtuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Perhubungan.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...

Blitar, 24 Februari 2025
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar



JUARI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196512041 98603 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan Dinas Perhubungan menjalankan beberapa fungsi diantaranya yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian serta pelayanan umum di bidang perhubungan.

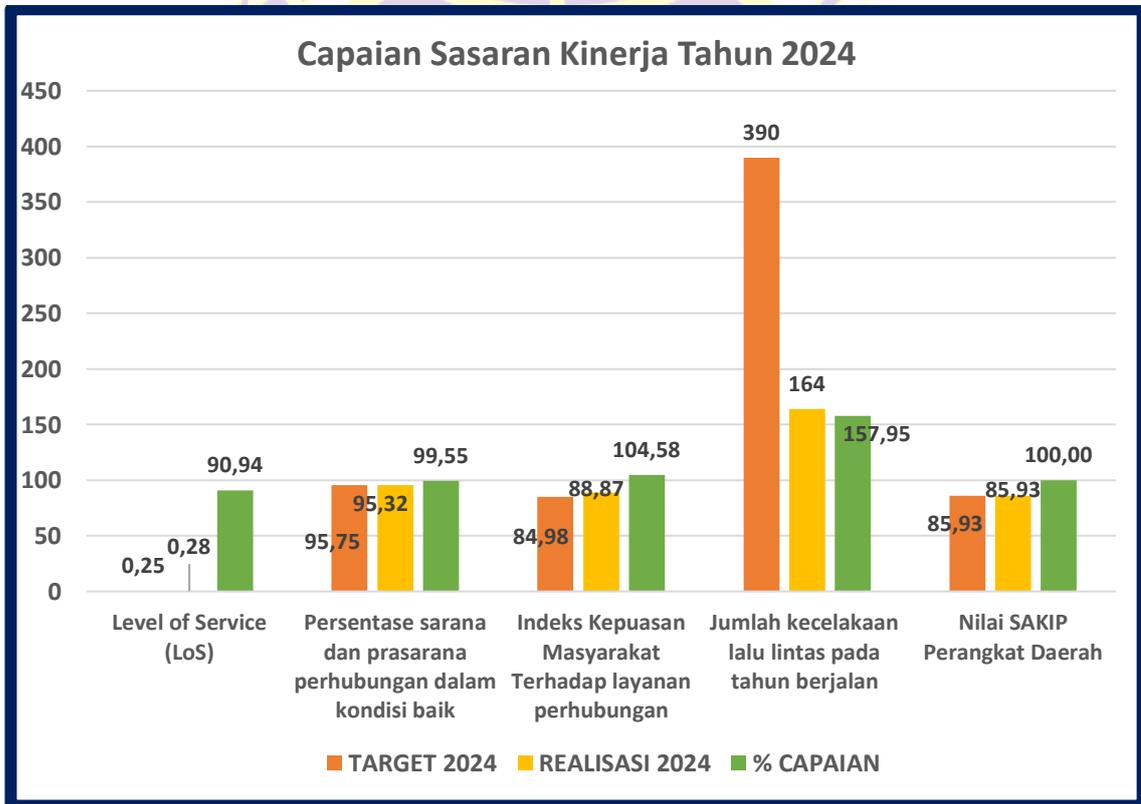
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dalam membangun Kota Blitar 5 (lima) tahun yang akan datang terdapat visi dan beberapa misi daerah yang diemban dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 yang mengakomodir urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI IV : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Perhubungan

Dari Tujuan dan Sasaran RPJMD diatas, maka dapat ditentukan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

<p>TUJUAN RENSTRA 2021-2026 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Kualitas Perhubungan 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
<p>SASARAN RENSTRA 2021-2026 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Adapun pencapaian Kinerja Sasaran dapat ditunjukkan pada table berikut:



Dalam pencapaian kinerja tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Blitar terdapat 3 (tiga) indikator sasaran kinerja yang tercapai dan 2 (dua) indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai. Indikator sasaran kinerja yang tercapai yaitu :

- 1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada indikator ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya:
 - ❖ Faktor pendukung: Strategi dan kebijakan pimpinan dalam implementasi SAKIP mulai dari unsur perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja maupun evaluasi internal yang dilakukan.
 - ❖ Faktor penghambat: Kurangnya sosialisasi implementasi SAKIP pada seluruh ASN.
- 2) Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan. Pada indikator sasaran kinerja ini juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya:
 - ❖ Faktor pendukung: SDM yang berkompeten dalam pemberian layanan
 - ❖ Faktor penghambat: Kurang optimalnya sarana prasarana dalam upaya peningkatan layanan.
- 3) Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas. Pada indikator sasaran kinerja ini juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya:
 - ❖ Faktor pendukung: Kebijakan pimpinan terkait pengendalian angka kecelakaan lalu lintas di Kota Blitar
 - ❖ Faktor penghambat: Belum optimalnya sarana prasarana perhubungan dan fasilitas keselamatan sesuai standar serta kurangnya sosialisasi kelalulintasan terhadap pengguna jalan.

Adapun Indikator sasaran kinerja yang tidak tercapai adalah:

- 1) Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik. Pada indikator sasaran kinerja ini ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya:
 - ❖ Faktor pendukung: SDM yang berkompeten serta strategi pimpinan dalam penyediaan perlengkapan jalan sesuai alokasi anggaran yang tersedia.
 - ❖ Faktor penghambat: Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana perhubungan dalam baik sesuai standar kebutuhan.

2) Level of Service (LoS). Pada indikator sasaran kinerja ini terdapat beberapa factor pendukung dan factor penghambat, yaitu:

- ❖ Faktor pendukung: SDM yang berkompeten dan kebijakan pimpinan dalam upaya peningkatan layanan jalan.
- ❖ Faktor penghambat: Kurang optimalnya ketersediaan perlengkapan jalan (perambuan) di beberapa ruas jalan.

Untuk menyikapi hal tersebut, maka untuk tahun 2026 direncanakan untuk mengalokasikan anggaran guna penyediaan sarana dan prasarana perhubungan serta fasilitas keselamatan lainnya.

Setelah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 berikut target dan realisasi kinerja serta anggarannya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		% Capaian		Efisiensi
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LoS)	0,25	19.647.500.279,36	0,28	16.572.291.680,00	90,94	84,35	1,08
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	95,75	10.493.881.207,36	95,32	10.351.584.376,00	99,55	98,64	1,01
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	84,98	3.677.117.072,00	88,87	3.366.612.052,00	104,58	91,56	1,14
Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	390	5.476.502.000,00	164	2.854.095.252,00	157,95	52,12	3,03
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,93	7.341.540.550,64	85,93	6.909.534.017,00	100	94,12	1,06

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran 1, *Meningkatnya kualitas perhubungan* dikatakan efisien, karena untuk mencapai kinerja sebesar 90,94% dibutuhkan anggaran sebesar 84,35%. Untuk sasaran 2, *Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan* dikatakan efisien, karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,55% dibutuhkan anggaran sebesar 98,64%. Untuk sasaran 3, *Meningkatnya kualitas layanan perhubungan* dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 104,58% membutuhkan anggaran sebesar 91,56%. Untuk sasaran 4, *Meningkatnya keselamatan transportasi* dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 157,95% membutuhkan anggaran sebesar 52,12%. Dan untuk sasaran 5, *Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah* juga dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dibutuhkan anggaran sebesar 94,12%.



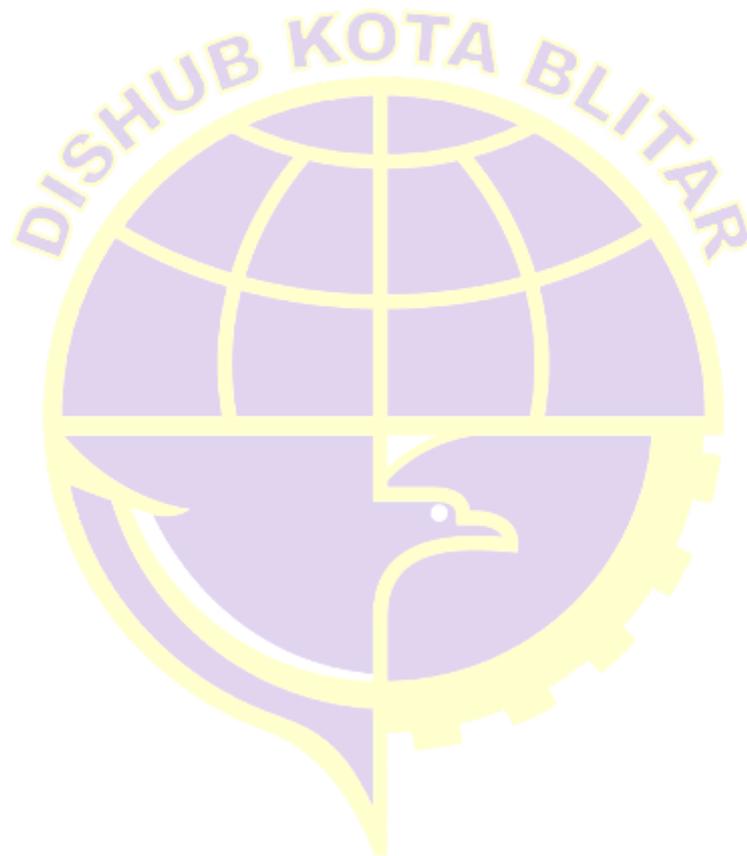
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI	8
BAB I PENDAHULUAN.....	10
A. Latar Belakang.....	10
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	10
C. Maksud dan Tujuan.....	15
D. Dasar Hukum	15
E. Aspek – Aspek Strategis	19
F. Isu – Isu Strategis	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
A. Rencana Strategis	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran.....	27
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2024	28
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024	41
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra.....	45
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM).....	46
B. Akuntabilitas Keuangan.....	49
1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	55
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran.....	56
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	64
C. Prestasi / Penghargaan.....	68

BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Langkah Perbaikan	73

Lampiran-lampiran

- I. Matrik Rencana Strategi OPD Tahun 2021-2026
- II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan Tahun 2023
- III. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- IV. Pengukuran Kinerja Tahun 2023



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran yang disertai dengan beberapa penjelasan atas pencapaian tersebut. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026. Selain itu penyusunan LKjIP Dinas Perhubunagn Kota Blitar Tahun 2024 sekaligus merupakan evaluasi akhir masa jabatan Walikota Blitar.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

I. Kedudukan

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan:

- 1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

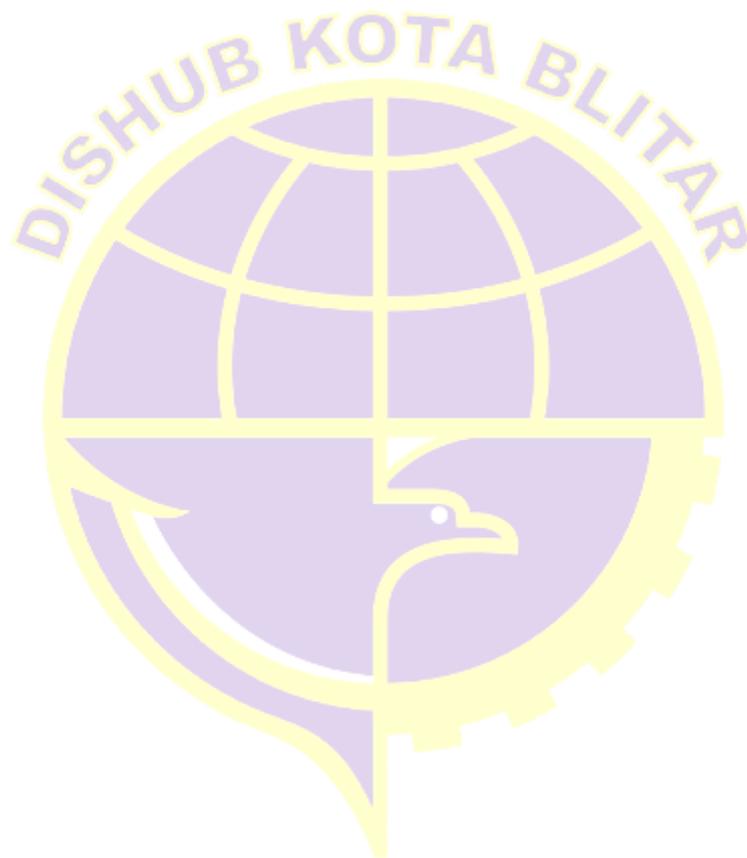
II. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut:

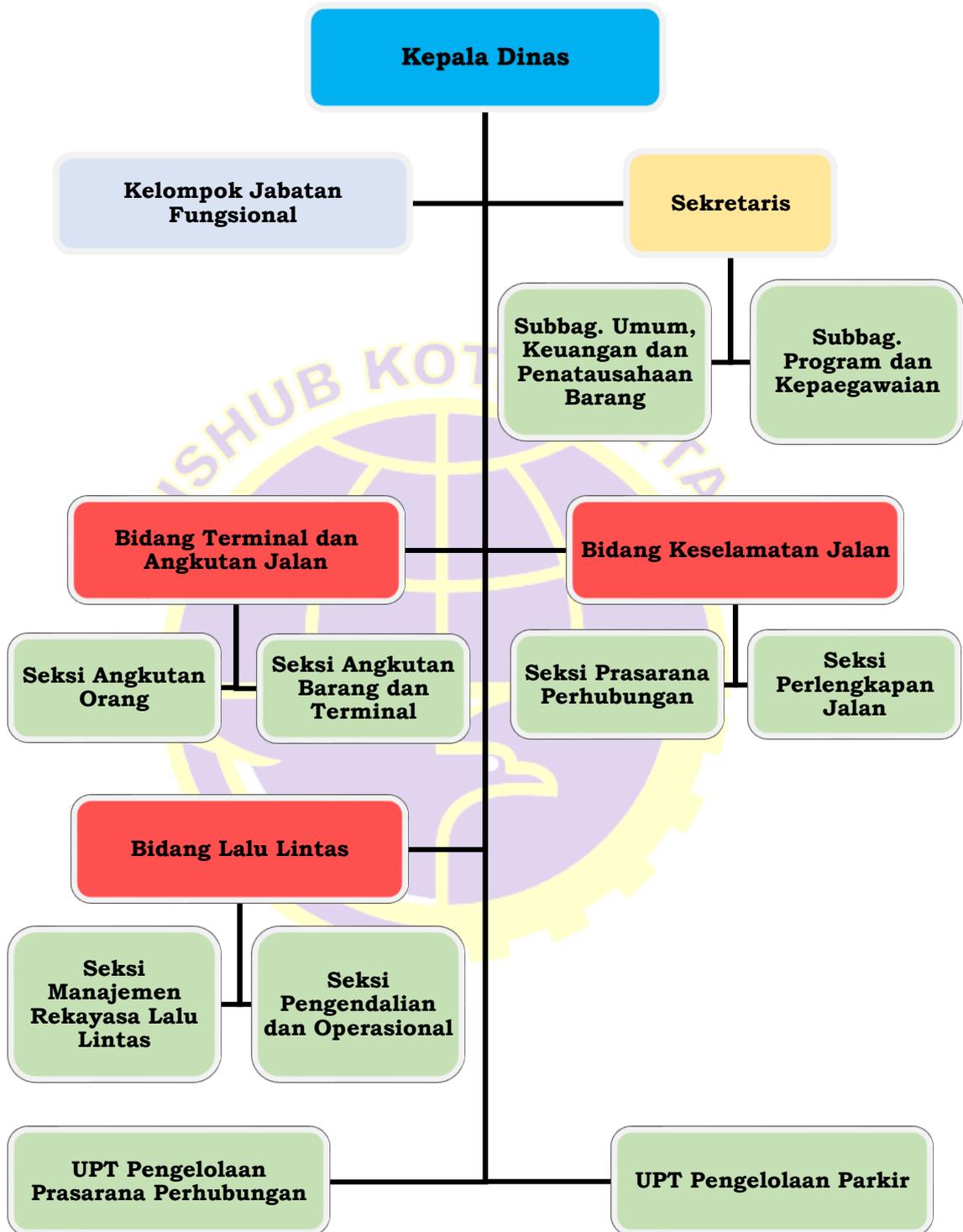
1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pengkoordinasian dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;
7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, dan sarana prasarana kerja;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di dalam lingkungan kantor;
10. Penyusunan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan IKM;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang perhubungan secara berkala melalui *sub dominan website* Pemerintah Daerah dan;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai kewenangan:
 - a. Penetapan kebijakan operasional di bidang Perhubungan;
 - b. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang Perhubungan;
 - c. Perencanaan operasional program Perhubungan;

- d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional Perhubungan, di tingkat kota;
- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang Perhubungan;
- f. Peremajaan data dalam bidang Perhubungan untuk tingkat kota;
- g. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perhubungan.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar pada tahun 2024 dan sekaligus evaluasi atas kinerja akhir masa jabatan Walikota Blitar , dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun

2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024;
26. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
27. Peraturan Walikota Blitar nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
28. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
29. Peraturan Walikota Blitar Nomor 37 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
30. Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024;
31. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024

E. Aspek – Aspek Strategis

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yaitu “KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat” yang kemudian dituangkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan, maka Dinas Perhubungan Kota Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya mengemban salah satu misi yaitu misi empat: “Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”. Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut dan seiring dengan penambahan jumlah penduduk Kota Blitar yang senantiasa membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, dimana ini merupakan suatu tantangan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi. Dengan perkembangan transportasi tersebut maka terdapat beberapa aspek strategis pengembangan yaitu pengembangan prasarana perhubungan, seperti menerapkan PJU LED yang ramah lingkungan dan hemat energi, penerapan manajemen rekayasa lalu lintas, pengelolaan terminal tipe C, peningkatan layanan angkutan sekolah gratis dan peningkatan layanan uji berkala kendaraan berkala. Selain itu juga perlunya dilakukan pembinaan kinerja juru parkir tepi jalan umum dan kawasan destinasi wisata serta sosialisasi edukasi akan pentingnya tertib berlalu lintas disetiap lapisan masyarakat guna terciptanya lalu lintas yang aman tertib dan lancar.

Strategi lain yang diusung Dinas Perhubungan Kota Blitar yaitu pengembangan Aplikasi SIDABUS, yaitu aplikasi yang diperuntukan bagi pengguna jasa layanan angkutan sekolah gratis (siswa /pelajar Kota Blitar) dengan memberikan kemudahan, kenyamanan bagi pengguna layanan serta diperolehnya data pengguna angkutan sekolah yang akurat. Pada pengembangan aplikasi ini ditambahkan menu penilaian IKM oleh pengguna

layanan yaitu siswa dan/ orang tua siswa, yang dapat menjadi evaluasi bagi Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan. Selain itu Dinas Perhubungan juga membangun Aplikasi manajemen parkir, yang mana aplikasi ini memudahkan pengelolaan administrasi penerimaan retribusi parkir agar tersusun rapi, valid dan akuntabel.

Selain aspek strategis diatas, Dinas Perhubungan Kota Blitar juga melakukan pengelolaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari 1) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; 2) Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan; 3) Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal dan 4) Hasil Sewa BMD.

F. Isu - Isu Strategis

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan dan kepentingan dari berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat. Transportasi dalam peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata hasil-hasil pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal, oleh sebab itu perencanaan transportasi di suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Melihat kondisi diatas maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan angkutan umum, sehingga perlu penyediaan fasilitas utama maupun pendukung berdasarkan kebutuhan atas hasil kajian yang disusun sebelumnya;
2. Belum Optimalnya sistem pengelolaan parkir. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jasa parkir tepi jalan umum dan rendahnya tingkat disiplin juru parkir dalam melakukan prosedur parkir di tepi jalan. Sehingga sangat perlu

sekali untuk diadakan sosialisasi terhadap pengguna parkir di tepi jalan serta pembinaan terhadap juru parkir secara periodic dalam rangka peningkatan kinerja dan PAD dari sector retribusi parkir tepi jalan umum.

3. Belum optimalnya keselamatan jalan menuju smart city khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana perhubungan serta fasilitas keselamatan, sehingga perlunya peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan;
4. Belum optimalnya pelayanan lalu lintas jalan, sehingga perlunya dilaksanakan sosialisasi tentang kesadaran berlalu lintas kepada semua golongan pengguna jalan baik masyarakat umum maupun anak sekolah, agar tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Blitar dapat di minimalisasi selain itu juga perlunya manajemen rekayasa lalu lintas dalam menjaga kestabilan arus jalan sehingga tidak menimbulkan kemacetan di beberapa ruas jalan;
5. Belum optimalnya pelayanan uji kendaraan, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kendaraan secara berkala. Sehingga perlunya sosialisasi kepada pemilik kendaraan wajib uji akan pentingnya kendaraan laik jalan. Disisi lain untuk peningkatan layanan uji berkala juga dibutuhkan alat uji yang sesuai standar, layak dan terkalibrasi secara berkala, sehingga kedepan perlu adanya penambahan, pemeliharaan dan kalibrasi alat uji secara berkala, agar layanan uji kendaraan tetap berjalan prima sesuai SOP yang ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2021-2026

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif dalam kurung waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Periode Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai keterkaitan dengan misi empat yaitu **“Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”**.

Berdasarkan misi Kepala Daerah tersebut, maka ditetapkanlah satu tujuan dengan tiga sasaran. Dan Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, masing-masing

dikembangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Adapun strategi dimaksud dapat dirumuskan sebagaimana tercantum dalam tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kota Blitar

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal	
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai	
		Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	
			Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	
	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas		Optimalisasi layanan angkutan sekolah
				Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT
				Optimalisasi pengelolaan parkir
				Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
				Penertiban pelanggaran lalu lintas
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	
			Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja tahun 2024 memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2024 serta menyebutkan program dan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Dinas Perhubungan Kota Blitar memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Perjanjian Kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta formulasi perhitungan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilihat pada table II.2 berikut dan Lampiran 2 LKjIP Tahun 2024:

Tabel II.2

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBAER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	V/C Ratio Kinerja Ruas Jalan pada tahun berjalan	Bidang Keselamatan Jalan, Bidang Lalu Lintas, UPT Pengelolaan Parkir	Kajian Kinerja Ruas Jalan
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi	Bidang Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang Lalu	Data sarpras perhubungan dan fasilitas keselamatan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBAER DATA
			baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	Lintas dan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan	
3.	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dan UPT Pengelolaan Parkir	Hasil penyusunan IKM layanan perhubungan
4.	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	Bidang Lalu Lintas	Data angka kecelakaan lalu lintas
5.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Sekretariat	Hasil Penilaian SAKIP PD oleh Tim SAKIP Kota Blitar

Perjanjian Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 ada 3 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota Blitar 2). Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, dan 3). Perjanjian kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III. Untuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota yang

selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi dapat ditunjukkan sebagai berikut.

SASARAN 1: Meningkatnya kualitas perhubungan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Level of Service (LoS)	nilai	0,25
SASARAN 2: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	95,75
SASARAN 3: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	Nilai	84,98 BAIK
SASARAN 4: Meningkatnya keselamatan transportasi	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	kejadian	390
SASARAN 5: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,93 A

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran 3 LKj IP 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Adapun Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

- a. Membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBD.
- b. Membandingkan realisasi Kinerja Sasaran sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) Kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Sasaran

No.	% Nilai Capaian Kinerja		Predikat
	%	Keterangan	
1	85% s.d. 100%	Delapan Puluh Lima persen sampai dengan Seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh Puluh persen sampai dengan kurang dari Delapan Puluh Lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Liam Puluh Lima persen sampai dengan kurang dari Tujuh Puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Dibawah Lima Puluh Lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi

Tahun 2024

Analisis atas capaian kinerja pada tahun 2024 merupakan analisis terhadap komitmen Dinas Perhubungan guna mencapai target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagaimana ditunjukkan dalam table III.1 berikut.

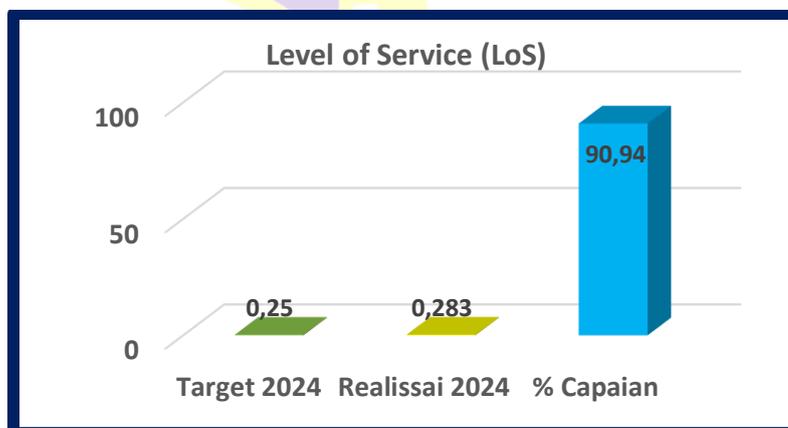
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	0,25	0,28	90,94
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	95,75	95,32	99,55
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	84,98	88,87	104,58
Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	390	164	157,95
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,93	A 85,93	100

Penjabaran analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran 1** : Meningkatkan Kualitas Perhubungan, dengan indikator kinerja *Level of Service (LOS)* memperoleh capaian sebesar 90,94%

Diagram 1:
Meningkatnya kualitas perhubungan



1) Keterangan :

- ❖ Definisi Operasional indikator ini adalah: Level Of service (LOS) suatu ruas jalan adalah perbandingan antara volume lalu lintas (v) dan kapasitas jalan (C). Pada kecepatan tinggi, volume lalu lintas pasti rendah, sebaliknya pada volume tinggi, kecepatan akan menurun.
- ❖ Formulasi perhitungan untuk indikator sasaran *Level of Service (LoS)* adalah V/C Ratio Kinerja Ruas Jalan pada tahun berjalan
- ❖ Indikator tujuan Level of Service dengan target predikat B terealisasi predikat B (v/c ratio 0,283) dengan tingkat capaian 100%. Sehingga capaian indikator ini dikatakan memenuhi target. Penentuan predikat Level of Service diambil dari nilai rata-rata v/c rasio beberapa ruas jalan yang mewakili ruas jalan di Kota Blitar. Berikut tabel level of service yang digunakan sebagai rumusan dalam menentukan predikat/ tingkat layanan ruas jalan.

Tingkat Pelayanan	Karakteristik Lalu Lintas	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0 - 0,20	60
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan	0,21 - 0,44	55
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan	0,45 - 0,74	50
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan	0,75 - 0,84	40

E	Volume lalu lintas mendekati / berada pada kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti	0,85 - 1	30-35
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas. Antrian panjang dan terjadi hambatan-hambatan yang besar	> 1	<30

Adapun hasil perhitungan/ kajian Level of Service di beberapa ruas jalan di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Nama Ruas	Panjang (km)	Co	F _{cw}	F _{Csp}	F _{Csf}	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service
Jl. Dr. Wahidin 1	0,115	2900	0,56	1	0,92	864	1344,67	0,64	C
Jl. Dr. Wahidin 2	0,140	2900	0,56	1	0,92	507	1344,67	0,38	B
Jl. Dr. Wahidin 3	0,334	2900	0,56	1	0,92	449	1344,67	0,33	B
Jl. Bromo	0,124	2900	0,56	1	0,92	682	1344,67	0,51	C
Jl. Moh. Hatta	0,287	2900	0,56	1	0,92	232	1344,67	0,54	C
Jl. Cakraningrat 1	0,302	2900	0,56	1	0,92	232	1344,67	0,17	A
Jl. Cakraningrat 2	0,591	2900	0,56	1	0,92	60	1344,67	0,04	A
Jl. Serayu	0,250	2900	0,56	1	0,92	291	1344,67	0,22	B
Jl. Raung	0,166	3300	0,56	1	0,92	194	1530,14	0,13	A
Jumlah						3511	12287,5	0,28	B

Dari tabel diatas dapat maka rata-rata v/c ratio berada di angka 0,28. Sehingga nilai ini dikategorikan pada tingkat pelayanan atau predikat B yang memiliki karakteristik arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan.

- ❖ Pada indikator kinerja *Level of Service (LoS)* terealisasi 0,28 dari target 0,25 dengan persentase capaian 90,94%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

❖ Faktor pendorong : Kebijakan pimpinan dalam menjalankan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta implementasi penataan, pengendalian dan operasional di lapangan oleh SDM yang berkompeten.

2) Dari hasil Analisa kajian ruas jalan maka ada beberapa permasalahan utama yang terjadi pada beberapa ruas jalan diantaranya:

a) Kemacetan pada ruas jalan

Dengan adanya wisata religi yaitu Masjid Arrohman menimbulkan kemacetan bagi pengguna jalan lainnya di ruas Jalan Raung. Hal ini disebabkan karena karena Masjid Arrohman tidak menyediakan tempat parkir khusus, sehingga kendaraan pengunjung maupun jamaah masjid parkir pada badan jalan. Kondisi ini dimungkinkan akan berdampak terhadap naiknya nilai V/C rasio dan penurunan Tingkat pelayanan yang berarti terjadi kemacetan lalu lintas.

b) Parkir On Street

Parkir On Street atau parkir dibadan jalan baik untuk kendarran pribadi maupun angkutan umum sering kali terlihat pada badan jalan di beberapa ruas jalan. Tentunya hal ini mengakibatkan hambatan pada ruas jalan dan simpang.

c) Simpang Jalan Raung – Dr. Wahidin

Pada simpang ini mengalami permasalahan yang cukup serius karena ada beberapa pengendara kebingungan

pada saat melewati simpang ini. Desain

Simpang yang kurang simetris dan lebar jalan yang tidak sama sehingga sebagian segmen jalan tidak berfungsi dan menyebabkan pengendara kebingungan.

d) Fasilitas Perambuan dan Marka jalan

Kurangnya rambu lalu lintas baik rambu larangan, rambu petunjuk ataupun rambu perintah yang ada disekitar lokasi studi. Jikapun ada kondisi rambu yang sudah tidak layak baik diakibatkan tertabrak oleh pengguna jalan ataupun kondisi fisik yang sudah tidak layak (tulisan buram).

3) Dari beberapa permasalahan utama diatas maka berdasarkan hasil analisa kajian kinerja ruas jalan disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a) Kemacetan pada ruas jalan Raung

Kemacetan yang berada di jalan Raung diakibatkan oleh bus pariwisata dan kendaraan pengunjung yang parkir di badan jalan untuk berwisata religi di masjid arrohman akibat tidak adanya lahan parkir khusus yang disediakan oleh pengembang atau pengelola. Dari hasil rekomendasi yang dapat diterapkan yaitu:

- Untuk sementara menggunakan parkir badan jalan disekitar Jalan raung dan area sekitar stadion dengan syarat telah tersedia fasilitas pendukung parkir antara lain : marka parkir, rambu parkir, petugas parkir, karcis parkir yang sesuai dengan Perda Kota Blitar dan petugas pengawas parkir.

- Memindahkan titik drop zone yang existing berada pada akses masuk masjid agar bergeser ke arah timur (depan SMPN 7) agar tidak menghambat arus lalu lintas.
- Melakukan sosialisasi terkait manajemen rekayasa lalu lintas Jl Raung serta penertiban arus kendaraan.

b) Parkir On Street

- Untuk Parkir yang berada di ruas jalan DR. Wahidin, jalan Bromo, dan jalan Moh Hatta agar pihak yang terkait (Dinas Perhubungan dan Satlantas Polres Blitar Kota) melakukan pengawasan dan penertiban secara berkala bagi kendaraan yang parkir melanggar rambu larangan parkir di ruas jalan tersebut.
- Memberikan sosialisasi kepada pengusaha di sekitar jalan Dr. Wahidin agar tidak melakukan bongkar muat barang tidak ditepi jalan.
- Meningkatkan kemampuan petugas parkir bagaimana cara menata parkir yang baik dan benar serta menarik retribusi sesuai Perda Retribusi Parkir Kota Blitar.

c) Fasilitas Perlengkapan Jalan

Sebagian Besar Lokasi Studi Kajian evaluasi kinerja ruas jalan kota Blitar ini masih banyak ditemui kurangnya fasilitas perlengkapan jalan baik rambu lalu lintas maupun marka jalan, antara lain:

- Jalan Dr. Wahidin 1: kurang 4 buah rambu peringatan
- Jalan Dr. Wahidin 2: kurang 1 buah rambu peringatan dan 1 rambu larangan
- Jalan Dr. Wahidin 3: kurang 4 rambu peringatan, 3 rambu petunjuk dan 1 rambu larangan
- Jalan Moh. Hatta: kurang 3 buah rambu peringatan dan 2 rambu petunjuk
- Jalan Cakraningrat 1: kurang 4 buah rambu peringatan dan marka jalan

- Jalan Cakraningrat 2: kurang 7 buah rambu peringatan dan marka
- Jalan Serayu: kurang 3 buah rambu peringatan, 1 buah rambu petunjuk, marka tengah dan marka zebra cross pada traffic ligh
- Jalan Bromo: kurang 2 buah rambu peringatan, 2 buah rambu perintah, 1 buah Warning Light dan marka parkir
- Jalan Raung: kurang 3 buah rambu perintah, 1 buah rambu peringatan, dan marka parkir

b. Sasaran 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan, dengan indikator kinerja *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* memperoleh capaian sebesar 99,55%.



**Diagram 2:
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan**



1) Keterangan :

- ❖ Jumlah Perlengkapan jalan dalam kondisi baik sejumlah 131.356 dari total keseluruhan 134.838. Jumlah prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik sejumlah 92 dari total keseluruhan 97. Jumlah fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik sejumlah 2.771 dari total keseluruhan 2.876. Sedangkan jumlah sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik sejumlah 18 dari total keseluruhan 19.
- ❖ Formulasi perhitungan indikator sasaran *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* adalah rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik. Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik sebesar 97,42%, persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik sebesar 94,85%, persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik sebesar 94,26% dan persentase sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik sebesar 94,74%.
- ❖ Pada indikator kinerja *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* terealisasi 95,32% dari

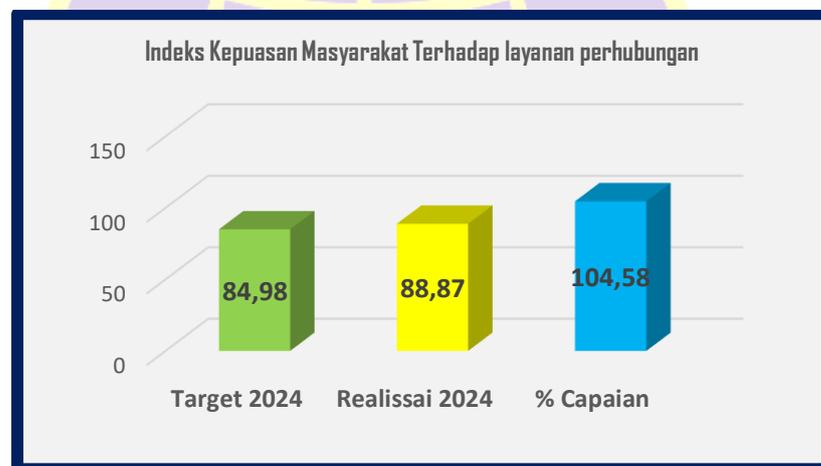
target 95,75% dengan persentase capaian 99,55%.
Sehingga indikator ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

❖ Faktor pendorong : Terdapatnya SDM yang berkompeten

- 2) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik sesuai standar kebutuhan.
- 3) Solusi yang ditempuh yaitu mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana perhubungan secara bertahap sesuai dengan pemetaan kebutuhan

c. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan, memperoleh capaian sebesar 104,76%

Diagram 3:
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan



1) Keterangan :

- ❖ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat layanan angkutan sekolah gratis sebesar 90,92. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat layanan uji kendaraan bermotor sebesar 92,90 sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan parkir tepi jalan umum sebesar 83,49.
- ❖ Formulasi perhitungan untuk indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan* adalah

rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM layanan uji kendaraan bermotor dan IKM pelayanan parkir tepi jalan umum

- ❖ Pada indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan* tercapai 88,87% dari target 84,98% dengan persentase capaian sebesar 104,58%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.
- ❖ Faktor pendorong : Terdapatnya SDM yang mencukupi dan berkompeten

- 2) Kendala mendasar yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini adalah terdapatnya penumpukan jumlah penumpang pada bebrapa armada yang hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah armada angkutan sekolah gratis baik untuk siswa umum maupun siswa berkebutuhan khusus.
- 3) Tindak lanjut atas kondisi tersebut yaitu dengan mengalokasikan anggaran penyediaan angkutan sekolah untuk siswa umum dan siswa berkebutuhan khusus secara bertahap sesuai pemetaan kebutuhan serta penyusunan kajian trayek/rute angkutan sekolah.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya keselamatan transportasi, dengan indikator kinerja *menurunnya angka kecelakaan lalu lintas* memperoleh capaian sebesar 162,98%.

Diagram 4:
Meningkatnya Keselamatan Transportasi



1) Keterangan :

Pada indikator sasaran menurunnya angka kecelakaan lalu lintas tercapai 164 kejadian dari target 390 kejadian dengan persentase capaian sebesar 157,95%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

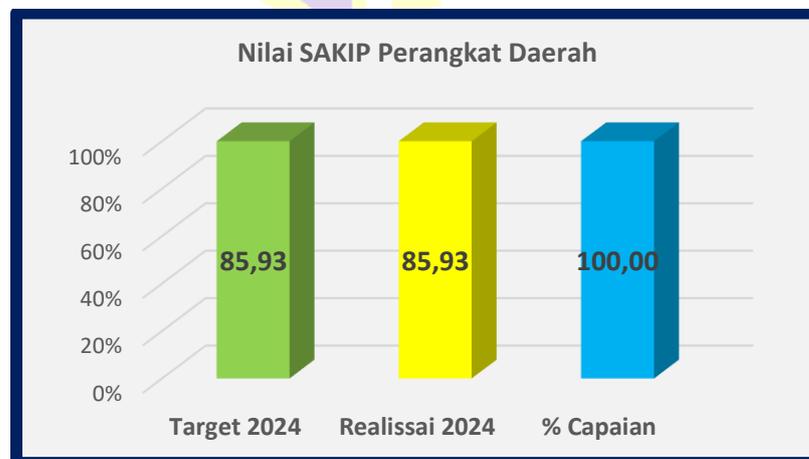
2) Berdasarkan capaian indikator yang diperoleh, terdapat beberapa kendala/ faktor penghambat yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini yaitu belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan sesuai standar kebutuhan selain itu juga masih kurangnya kesadaran masyarakat pengguna jalan akan lalu lintas berkeselamatan.

3) Solusi/Rencana Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah pengalokasian anggaran rangka pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan seperti rambu, APILL dan fasilitas keselamatan lainnya serta sosialisasi kelalulintasan kepada masyarakat pengguna jalan secara bertahap sesuai pemetaan kebutuhan.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* memperoleh capaian sebesar 100,00%

Diagram 5:

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah



1) Keterangan :

Pada indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 85,93 dari target 85,93 dengan persentase capaian sebesar 100%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

2) Berdasarkan capaian indikator yang diperoleh, terdapat beberapa kendala/ factor penghambat yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini yaitu :

- ❖ Dokumen perencanaan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dan memenuhi kriteria SMART
- ❖ Monev Renaksi belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktifitas dan penyesuaian anggaran serta strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja
- ❖ Masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya memahami dan peduli atas penyajian informasi dalam laporan kinerja
- ❖ Hasil evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

3) Solusi/Rencana Tindak lanjut yang harus dilakukan adalah:

- ❖ Mereviu dokumen perencanaan dan memastikan tujuan serta sasaran strategis berorientasi hasil dan memenuhi kriteria SMART
- ❖ Memanfaatkan hasil monev kinerja untuk penyesuaian aktivitas serta anggaran serta penentuan kebijakan dan arah strategi
- ❖ Optimalisasi sosialisasi informasi dan laporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai
- ❖ Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung aktivitas dan efisiensi kinerja

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel III.2 berikut :

Tabel III.2
Pencapaian Target pada Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	90,94%	V			
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	99,55%	V			
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	104,58%	V			
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	157,95%	V			
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100,00%	V			
Rata-rata keberhasilan capaian Sasaran Strategis		110,60	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja sasaran tersebut, menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar pada tahun 2024 termasuk kategori Sangat Berhasil, dengan nilai capaian kinerja 110,60%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 – 2024

Perbandingan data kinerja terhadap realisasi kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 (tahun capaian akhir masa jabatan Walikota Blitar) untuk setiap indikatornya diuraikan pada tabel III.3 berikut:

Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022- 2024

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi			% Capaian Kinerja		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kualitas perhubungan	Level of Service (LoS)	C 0,47	C 0,465	B 0,259	C 0,478	B 0,259	B 0,283	98,30 %	144,30 %	90,94 %
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	93 %	94 %	95,75 %	92,31	95,75 %	95,32 %	99,26 %	101,86 %	99,55 %
3	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,10	81,12	84,98	81,86	84,98	88,87	100,94 %	104,76 %	104,58 %
4	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	-	-	390	-	-	164	-	-	157,95 %
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	85,05	85,93	85,40	84,07	85,93	101,67 %	98,85 %	100 %

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2022-2024 diatas dapat disimpulkan bahwa:

- ❖ Persentase Capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya kualitas perhubungan* dengan indikator kinerja Level of Service (LoS) dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan sedangkan dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 42,98% sedangkan pada tahun 2023 mencapai 144,30% dan tahun 2024 mencapai 90,94%. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurang tersedianya perambuan dan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas, sehingga tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut diantaranya penyediaan perambuan sesuai kebutuhan serta pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas dalam mengurai kemacetan.
- ❖ Persentase Capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan* dengan indikator kinerja Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 99,26% sedangkan pada tahun 2023 mencapai 101,86% dan pada tahun 2024 mencapai 99,55%. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurang tersedianya sarana dan prasarana perhubungan sesuai kebutuhan, sehingga tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut diantaranya pengalokasian anggaran terkait penyediaan sarana prasarana perhubungan secara bertahap sesuai pemetaan kebutuhan.
- ❖ Persentase capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya kualitas layanan perhubungan* dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan dari tahun

2022 ke tahun 2023 mengalami kenaikan sedangkan dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 100,94% sedangkan pada tahun 2023 mencapai 104,76% dan pada tahun 2024 mencapai 104,58%. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurang tersedianya sarana angkutan umum (angkutan sekolah); belum adanya kajian trayek/ rute angkutan sekolah; dan belum optimalnya kinerja juru parkir tepi jalan umum. Sehingga tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut adalah pengalokasian anggaran terkait penyediaan sarana angkutan umum; penyusunan kajian trayek/rute angkutan sekolah; serta pembinaan juru parkir secara bertahap sesuai pemetaan kebutuhan.

- ❖ Persentase capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya keselamatan transportasi* dengan indikator kinerja Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 dan 2023 belum dilakukan penghitungan dan pada tahun 2024 mencapai 162,98%. Permasalahan yang dihadapi yaitu kurang tersedianya sarana prasarana perhubungan serta kesadaran pengguna jalan akan lalu lintas berkeselamatan. Sehingga tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut adalah pengalokasian anggaran terkait penyediaan sarana prasarana perhubungan dan penyelenggaraan sosialisasi kelalulintasan kepada masyarakat pengguna jalan secara bertahap sesuai pemetaan kebutuhan.
- ❖ Persentase capaian kinerja sasaran strategis *Meningkatnya kinerja perangkat daerah* dengan indikator kinerja nilai SAKIP perangkat daerah dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sedangkan dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2022 persentase capaian kinerja sebesar 101,67% sedangkan pada tahun 2023 sebesar 98,85% sedangkan pada tahun 2024 mencapai 100%. Permasalahan yang dihadapi yaitu penyusunan dokumen perencanaan kurang memenuhi kriteria SMART; pengukuran kinerja belum mempengaruhi

aktivitas, anggaran, strategi dan kebijakan yang diambil; adanya pegawai yang kurang memahami dan peduli terkait laporan kinerja; dan hasil evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kinerja. Sehingga tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut adalah mereviu dokumen perencanaan agar memenuhi kriteria SMART; memanfaatkan pengukuran kinerja dalam penyesuaian aktivitas, anggaran, strategi dan kebijakan; sosialisasi peningkatan pemahaman dan kepedulian akan informasi laporan kinerja kepada pegawai; dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 sampai dengan periode Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel III.4 berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2021-2026
Dinas Perhubungan Kota Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2024	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	B 0,430	B 0,283	134,19%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	97 %	95,32%	98,27 %
3	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,18 Baik	88,87 Baik	109,47 %
4	Meningkatnya keselamatan	Menurunnya angka kecelakaan lalu	366 kejadian	164 kejadian	155,19%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2024	Tingkat Kemajuan
	transportasi	lintas			
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,30 A	85,93 A	100,74%

Berdasarkan tabel diatas ada 4 (empat) indikator kinerja yang capaian realisasi tahun 2024 sudah melebihi target akhir Renstra dan 1 (satu) indicator kinerja yang capaian realisasinya tahun 2024 belum mencapaia target akhir Renstra. Untuk indikator yang sudah mencapaia target Renstra, yaitu:

- ❖ Level of Service (LOS)
- ❖ Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan.
- ❖ Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
- ❖ Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sedangkan indikator yang belum mencapai target akhir Renstra adalah persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik. Hal ini dikarenakan tahun 2024 merupakan tahun ke empat periode Renstra dan akan dilakukan percepatan pencapaian kinerja atas indicator ini pada tahun 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan
6. Sosial

Merujuk pada hal diatas, maka pada tahun 2024 Dinas Perhubungan tidak berkewajiban melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun Dinas Perhubungan Kota Blitar tetap melakukan evaluasi perbandingan terhadap realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Lainnya.



Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota Lain
Tahun 2024

Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
		Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar	Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar	Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LoS)	0,54	0,2595	0,44	0,283	118,52%	90,94%
Meningkatnya Kinerja Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan prasarana perhubungan layak fungsi (Kabupaten Tulungagung) - Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik (Kota Blitar) 	87 %	95,75 %	88,81%	95,32 %	102,08 %	99,55 %

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tabel III.6 berikut akan kami sajikan pagu anggaran, realisasi anggaran dan sisa pagu anggaran beserta persentase realisasinya.

Tabel III.6
Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	7.341.540.5 50,64	6.909.534 .017,00	94,12 %	432.006.5 33,64	5,88%
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.035.500, 00	14.018.00 0,00	99,88 %	17.500,00	0,12%
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.879.500,0 0	4.877.000 ,00	99,95 %	2.500,00	0,05%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.156.000,0 0	9.141.000 ,00	99,84 %	15.000,00	0,16%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.345.396.1 29,00	5.059.136 .712,00	94,64 %	286.259.4 17,00	5,36%
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.343.838.5 29,00	5.057.659 .112,00	94,64 %	286.179.4 17,00	5,36%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	1.557.600,0 0	1.477.600 ,00	94,86 %	80.000,00	5,14%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	389.688.84 1,64	388.215.1 00,00	99,62 %	1.473.741 ,64	0,38%
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	244.211.84 1,64	243.156.8 00,00	99,57 %	1.055.041 ,64	0,43%
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	145.477.00 0,00	145.058.3 00,00	99,71 %	418.700,0 0	0,29%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.401.38 0,00	354.335.8 15,00	97,51 %	9.065.565 ,00	2,49%
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.495.300,0 0	6.955.000 ,00	92,79 %	540.300,0 0	7,21%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.024.100, 00	11.818.40 0,00	98,29 %	205.700,0 0	1,71%
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.525.980, 00	13.054.20 0,00	96,51 %	471.780,0 0	3,49%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.070.000, 00	56.079.00 0,00	98,26 %	991.000,0 0	1,74%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.900.000,0 0	7.782.500 ,00	98,51 %	117.500,0 0	1,49%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	7.800.000,0 0	7.536.000 ,00	96,62 %	264.000,0 0	3,38%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.586.00 0,00	251.110.7 15,00	97,49 %	6.475.285 ,00	2,51%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.815.700, 00	34.335.60 0,00	90,80 %	3.480.100 ,00	9,20%
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	7.035.600,0 0	7.035.600 ,00	100,0 0%	0,00	0,00%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.780.100, 00	27.300.00 0,00	88,69 %	3.480.100 ,00	11,31%
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	712.367.60 0,00	643.834.0 45,00	90,38 %	68.533.55 5,00	9,62%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	269.988.00 0,00	213.437.3 44,00	79,05 %	56.550.65 6,00	20,95%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	442.379.60 0,00	430.396.7 01,00	97,29 %	11.982.89 9,00	2,71%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	478.835.40 0,00	415.658.7 45,00	86,81 %	63.176.65 5,00	13,19%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	359.572.80 0,00	299.755.2 45,00	83,36 %	59.817.55 5,00	16,64%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.065.000, 00	24.674.50 0,00	98,44 %	390.500,0 0	1,56%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	74.097.600, 00	72.229.00 0,00	97,48 %	1.868.600 ,00	2,52%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.100.000,00	19.000.000,00	94,53 %	1.100.000,00	5,47%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.383.901.807,36	10.241.845.805,00	98,63 %	142.056.002,36	1,37%
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	10.383.901.807,36	10.241.845.805,00	98,63 %	142.056.002,36	1,37%
Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.631.915.107,36	2.603.154.250,00	98,91 %	28.760.857,36	1,09%
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	39.062.200,00	38.458.300,00	98,45 %	603.900,00	1,55%
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	7.330.424.500,00	7.233.279.255,00	98,67 %	97.145.245,00	1,33%
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	382.500.000,00	366.954.000,00	95,94 %	15.546.000,00	4,06%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	109.979.400,00	109.738.571,00	99,78 %	240.829,00	0,22%
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	109.979.400,00	109.738.571,00	99,78 %	240.829,00	0,22%
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	59.979.400,00	59.806.687,00	99,71 %	172.713,00	0,29%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	50.000.000,00	49.931.884,00	99,86%	68.116,00	0,14%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.696.687.604,00	1.406.142.200,00	82,88%	290.545.404,00	17,12%
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.696.687.604,00	1.406.142.200,00	82,88%	290.545.404,00	17,12%
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	1.696.687.604,00	1.406.142.200,00	82,88%	290.545.404,00	17,12%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	435.114.068,00	431.339.002,00	99,13%	3.775.066,00	0,87%
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	435.114.068,00	431.339.002,00	99,13%	3.775.066,00	0,87%
Sub Kegiatan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan	47.958.950,00	46.821.650,00	97,63%	1.137.300,00	2,37%
Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	362.155.118,00	359.517.352,00	99,27%	2.637.766,00	0,73%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.545.315.400,00	1.529.130.850,00	98,95 %	16.184.550,00	1,05%
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.545.315.400,00	1.529.130.850,00	98,95 %	16.184.550,00	1,05%
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	1.009.726.600,00	1.008.800.266,00	99,91 %	926.334,00	0,09%
Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	535.588.800,00	520.330.584,00	97,15 %	15.258.216,00	2,85%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.476.502.000,00	2.854.095.252,00	52,12 %	2.622.406.748,00	47,88%
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	5.476.502.000,00	2.854.095.252,00	52,12 %	2.622.406.748,00	47,88%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Realisasi Anggaran	
		Rp	%	Rp	%
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.084.425.600,00	2.075.736.521,00	99,58 %	8.689.079,00	0,42%
Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	99.607.700,00	91.017.500,00	91,38 %	8.590.200,00	8,62%
Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3.206.376.000,00	605.607.066,00	18,89 %	2.600.768.934,00	81,11%
Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	86.092.700,00	81.734.165,00	94,94 %	4.358.535,00	5,06%
TOTAL	26.989.040.830,00	23.481.825.697,00	87,01 %	3.507.215.133,00	12,99%

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada Sasaran Strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.7
Alokasi per Sasaran Pembangunan
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	19.647.500.279,36	72,80%
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	10.493.881.207,36	38,88%
3	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	3.677.117.072,00	13,62%
4	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	5.476.502.000,00	20,30%
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.341.540.550,64	27,20%

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 ditunjukkan dalam tabel III.8 berikut :

Tabel III.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	nilai	0,259	0,283	90,94	19.647.500.279,36	16.572.291.680	84,35
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik</i>	<i>%</i>	<i>99,55</i>	<i>98,62</i>	<i>99,07</i>	<i>10.383.901.807,36</i>	<i>10.241.845.805,00</i>	<i>98,63</i>
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik</i>	<i>%</i>	<i>96,97</i>	<i>94,85</i>	<i>97,81</i>	<i>109.979.400,00</i>	<i>109.738.571,00</i>	<i>99,78</i>
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum</i>	<i>indeks</i>	<i>82,75</i>	<i>83,49</i>	<i>100,89</i>	<i>1.696.687.604,00</i>	<i>1.406.142.200,00</i>	<i>82,88</i>
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor</i>	<i>indeks</i>	<i>84,26</i>	<i>92,20</i>	<i>109,42</i>	<i>435.114.068,00</i>	<i>431.339.002,00</i>	<i>99,13</i>

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	indeks	87,92	90,92	103,41	1.545.315.400,00	1.529.130.850,00	98,95
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	%	0,31	-0,62	-200	5.476.502.000,00	2.854.095.252,00	52,12
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					90,94	19.647.500.279,36	16.572.291.680	84,35
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	95,75	95,32	99,55	10.493.881.207,36	10.351.584.376,00	98,64
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	%	99,55	98,62	99,07	10.383.901.807,36	10.241.845.805,00	98,63
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	jenis	2	2	100,00	10.383.901.807,36	10.241.845.805,00	98,63

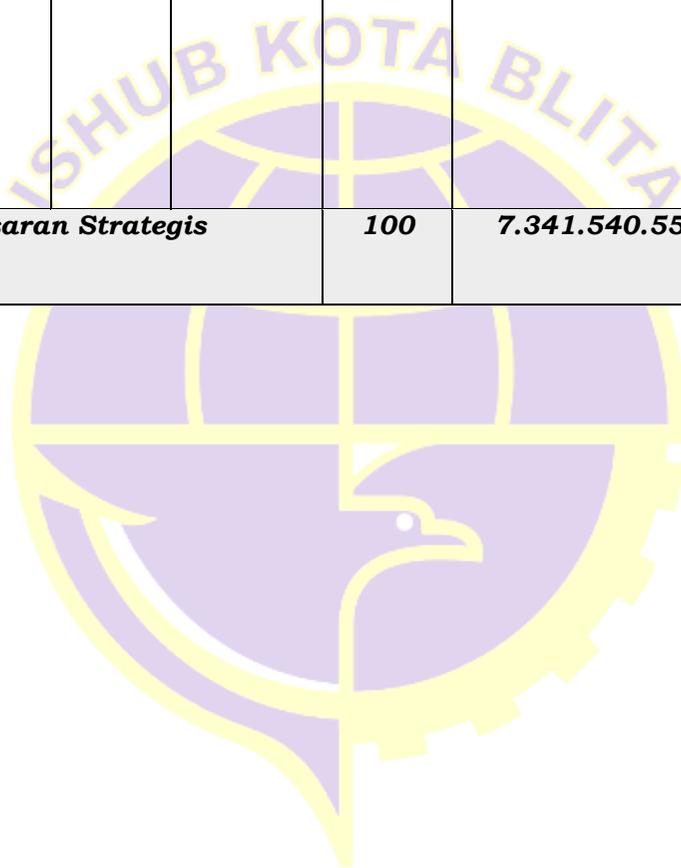
Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	%	96,97	94,85	97,81	109.979.400,00	109.738.571,00	99,78
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	jenis	15	15	100,00	109.979.400,00	109.738.571,00	99,78
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					99,55	10.493.881.207,36	10.351.584.376,00	98,64
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	indeks	84,98	88,87	104,58	3.677.117.072,00	3.366.612.052,00	91,56
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	Indeks	87,92	90,92	103,41	1.545.315.400,00	1.529.130.850,00	98,95
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	%	95,92	88,89	92,67	1.545.315.400,00	1.529.130.850,00	98,95

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	Indeks	84,26	92,20	109,42	435.114.068,00	431.339.002,00	99,13
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	%	95,50	96,68	101,24	435.114.068,00	431.339.002,00	99,13
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Indeks	82,75	83,49	100,89	1.696.687.604,00	1.406.142.200,00	82,88
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	%	78	80,77	103,55	1.299.445.849,00	1.696.687.604,00	1.406.142.200,00
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					104,58	3.677.117.072,00	3.366.612.052,00	91,56
Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	kejadian	390	164	157,95	5.476.502.000,00	2.854.095.252,00	52,12
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	%	0,31	-0,62	-200	5.476.502.000,00	2.854.095.252,00	52,12

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	kajian	2	2	100,00	5.476.502.000,00	2.854.095.252,00	52,12
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					157,95	5.476.502.000,00	2.854.095.252,00	52,12
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	85,93	85,93	100	7.341.540.550,64	6.909.534.017,00	94,12
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	<i>indeks</i>	<i>86,17</i>	<i>87,77</i>	<i>101,86</i>	<i>7.341.540.550,64</i>	<i>6.909.534.017,00</i>	<i>94,12</i>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	14.035.500,00	14.018.000,00	99,88

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	5.345.396.129,00	5.059.136.712,00	99,64
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	389.688.841,64	388.215.100,00	99,62
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	363.401.380,00	354.335.815,00	97,51
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	37.815.700,00	34.335.600,00	90,80
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	712.367.600,00	643.834.045,00	90,38

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	478.835.400,00	415.658.745,00	86,81
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis					100	7.341.540.550,64	6.909.534.017,00	94,12



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2024 adalah:

- ❖ Sasaran 1: “Meningkatnya kualitas perhubungan” persentase capaian kinerjanya mencapai 90,94% dengan persentase capaian anggaran sebesar 84,35%;
- ❖ Sasaran 2: “Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan” persentase capaian kinerjanya mencapai 99,55% dengan persentase capaian anggaran sebesar 98,64%;
- ❖ Sasaran 3: “Meningkatnya kualitas layanan perhubungan” persentase capaian kinerjanya mencapai 104,58% dengan persentase capaian anggaran sebesar 91,56%;
- ❖ Sasaran 4: “Meningkatnya keselamatan transportasi” persentase capaian kinerjanya mencapai 157,95% dengan persentase capaian anggaran sebesar 52,12%;
- ❖ Sasaran 5: “Meningkatnya kinerja perangkat daerah” persentase capaian kinerjanya mencapai 100% dengan persentase capaian anggaran sebesar 94,12%.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024 ditunjukkan pada tabel III.9 berikut :

Tabel III.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2024
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	90,94	84,35	1,08

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik</i>	99,07	98,63	1,00
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik</i>	97,81	99,78	0,98
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum</i>	100,89	82,88	1,22
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor</i>	109,42	99,13	1,10
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis</i>	103,41	98,95	1,05
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu ralu lint</i>	-200	52,12	-3,84
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		90,94	84,35	1,08
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	99,55	98,64	1,01
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik</i>	99,07	98,63	1,00
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik</i>	97,81	99,78	0,98
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		99,55	98,64	1,01

Sasaran Strategis/ Kinerja Utama/ Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	104,58	91,56	1,14
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis</i>	<i>100,89</i>	<i>82,88</i>	<i>1,22</i>
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor</i>	<i>109,42</i>	<i>99,13</i>	<i>1,10</i>
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum</i>	<i>103,41</i>	<i>98,95</i>	<i>1,05</i>
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		104,58	91,56	1,14
Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	157,95	52,12	3,03
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas</i>	<i>-200</i>	<i>52,12</i>	<i>-3,84</i>
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		157,95	52,12	3,03
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	94,12	1,06
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	<i>101,86</i>	<i>94,12</i>	<i>1,08</i>
Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		100	94,12	1,06

Dari tabel diatas, untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat disimpulkan bahwa :

- ❖ Sasaran 1: Meningkatnya kualitas perhubungan, tingkat efisiensinya sebesar 1,08. Hal ini dapat dikatakan efisiensi karena untuk mencapai kinerja sebesar 90,94% hanya membutuhkan anggaran sebesar 84,35%.
- ❖ Sasaran 2: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan, tingkat efisiensinya sebesar 1,01. Hal ini dapat dikatakan efisiensi karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,55% hanya membutuhkan anggaran sebesar 98,64%.
- ❖ Sasaran 3: Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan, tingkat efisiensinya sebesar 1,14. Hal ini juga dikatakan efisiensi karena untuk mencapai kinerja sebesar 104,58% membutuhkan anggaran sebesar 91,56%.
- ❖ Sasaran 4: Meningkatnya keselamatan transportasi, tingkat efisiensinya sebesar 3,03. Hal ini dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja 157,95% membutuhkan anggaran sebesar 52,12%.
- ❖ Sasaran 5: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, tingkat efisiensinya sebesar 1,06. Hal ini dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja 100% membutuhkan anggaran sebesar 94,12%.
- ❖ Dari kelima sasaran kinerja Perangkat Daerah diatas semua mencapai efisiensi, hal ini disebabkan beberapa faktor pendorong yaitu selain tercukupinya SDM yang berkompeten juga karena strategi dan kebijakan pimpinan mulai proses perencanaan sampai dengan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan secara berkala guna optimalisasi capaian kinerja organisasi.

C. Prestasi / Penghargaan

Pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Blitar dalam menjalankan tata kelola sistem transportasi mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya:

- 1) Perolehan Wahana Tata Nugraha Tahun 2024 yang diserahkan langsung pada 07 September 2024 oleh Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi.



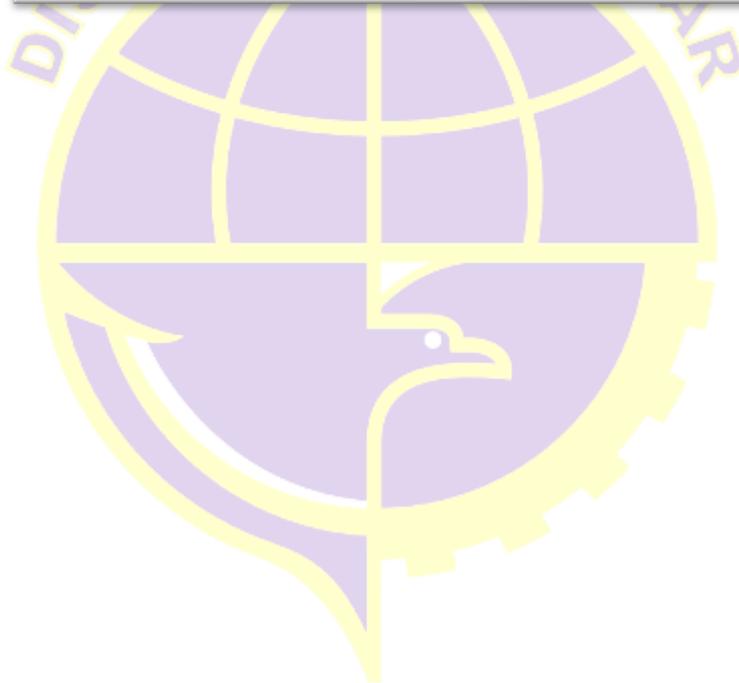
- 2) Juara 2 Kawasan Tertib Lalu Lintas dari Polda Jawa Timur. Penghargaan ini diserahkan pada 26 September 2024 oleh Kapolda Jawa Timur kepada Kasatlantas Blitar Kota dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar. Penghargaan ini merupakan bentuk kolaborasi antara Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Polres Kota Blitar dalam upaya mewujudkan kawasan perkotaan yang aman, tertib dan lancar.



- 3) Aksi Nyata dan Kolaborasi dalam Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kereta Api di Jawa Timur Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan pada 17 Desember 2024 oleh Dirjen Perkeretaapian kepada Kabupaten/Kota terpilih



- 4) Aksi Peningkatan Keselamatan di Perlintasan Sebidang Kereta Api Tahun 2024. Penghargaan ini diberikan pada 17 Desember 2024 oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota terpilih.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Dinas Perhubungan kota Blitar tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Blitar. Dari hasil capaian Indikator Kinerja sasaran, dapat disimpulkan bahwa:

Sasaran 1, Meningkatnya kualitas perhubungan dengan indikator sasaran *Level Of Service (LOS)*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2024 mencapai 0,283 dari target 0,259 dengan capain 90,94%, sehingga pada sasaran ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Sasaran 2, Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dengan indikator sasaran *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2024 mencapai 95,32% dari target 95,75% dengan capain 99,55%, sehingga pada sasaran ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Sasaran 3, Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan dengan indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2024 mencapai 88,87 dari target 84,98 dengan tingkat capain sebesar 104,58%. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Sasaran 4, Meningkatnya keselamatan transportasi dengan indikator sasaran *Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2024 mencapai 164 kejadian dari target 390 kejadian dengan capain 157,95%, sehingga

pada sasaran ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Sasaran 5, Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2024 mencapai 85,93 dari target 85,93 dengan tingkat capaian 100%. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan Sangat Berhasil.

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja sasaran tersebut, menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar pada tahun 2024 termasuk kategori Sangat Berhasil, dengan nilai capaian kinerja **110,60%**.

Pada tahun 2024 Anggaran Belanja yang teralokasi untuk Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024 sebesar Rp 26.989.040.830,00 (*Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Rupiah*) dan terserap Rp. 23.481.825.697,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Delapan Puluh satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) atau sebesar **87,01%** dari jumlah pagu.

Mengacu pada capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 maka efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024 sebesar **1,27**.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2024 dapat dikatakan Sangat Berhasil, namun demikian masih tetap dijumpai beberapa kendala/ hambatan dalam pelaksanaannya baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kinerja Perangkat Daerah diantaranya: masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan; masih kurangnya armada

angkutan sekolah gratis; belum adanya kajian trayek/rute angkutan sekolah; kurangnya kesadaran pengguna jalan akan lalu lintas berkeselamatan; dan belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dalam implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

B. Langkah Perbaikan

Langkah Perbaikan dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi, ada beberapa langkah strategi yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasarana dan fasilitas perhubungan yang lebih memadai sesuai dengan standar kebutuhan;
2. Optimalisasi pengelolaan Terminal tipe C;
3. Optimalisasi layanan angkutan sekolah gratis;
4. Optimalisasi kinerja juru parkir tepi jalan umum;
5. Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalulintas;
6. Optimalisasi layanan uji kendaraan bermotor dengan berbagai inovasinya;
7. Mereviu kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh serta memastikan tujuan dan sasaran strategis sudah berorientasi hasil dan indikator kinerja sudah memenuhi kriteria SMART;
8. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran maupun penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja;
9. Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai;

10. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun rencana tindak lanjut dan time line pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut:



Tabel IV.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Perhubungan Kota Blitar
Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
1	Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasarana dan fasilitas perhubungan yang lebih memadai	Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 	√	√	√
2	Optimalisasi pengelolaan Terminal Tipe C	Melaksanakan pembangunan/ pemeliharaan lanjutan fasilitas utama/ penunjang Terminal Tipe c	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 			√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			<ul style="list-style-type: none"> - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) - Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang 			
3	Optimalisasi layanan angkutan sekolah gratis	Penyusunan kajian trayek/ rute angkutan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 			√
		Pengendalian dan pengawasan operasionalisasi angkutan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
			- Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			
4	Optimalisasi kinerja juru parkir dan dalam rangka peningkatan PAD parkir	Penertiban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian juru parkir	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	√	√	√
5	Peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalulintas	Sosialisasi edukasi kelalulintasan kepada pengguna jalan	- Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
6	Optimalisasi layanan uji berkala kendaraan bermotor	Pemeliharaan alat uji kendaraan dan fasilitas pendukung lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) - Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 		√	
7	Mereviu kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh serta memastikan tujuan dan sasaran strategis sudah berorientasi hasil dan indikator kinerja sudah memenuhi kriteria SMART	Mereviu dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai kriteria SMART	<ul style="list-style-type: none"> - Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 		√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
8	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran maupun penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja	Monev capaian kinerja seluruh pegawai secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> - Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	√	√	√
9	Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai	Sosialisasi informasi dalam laporan kinerja kepada seluruh pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 		√	√

No	Langkah Perbaikan LKjIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2025 (murni)	Tahun 2025 (perubahan)	Tahun 2026
10	Memfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi	Monev akuntabilitas dalam upaya efektifitas dan efisiensi kinerja Perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 		√	√

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Blitar, sehingga secara bersama-sama kita bisa membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah menuju peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar.

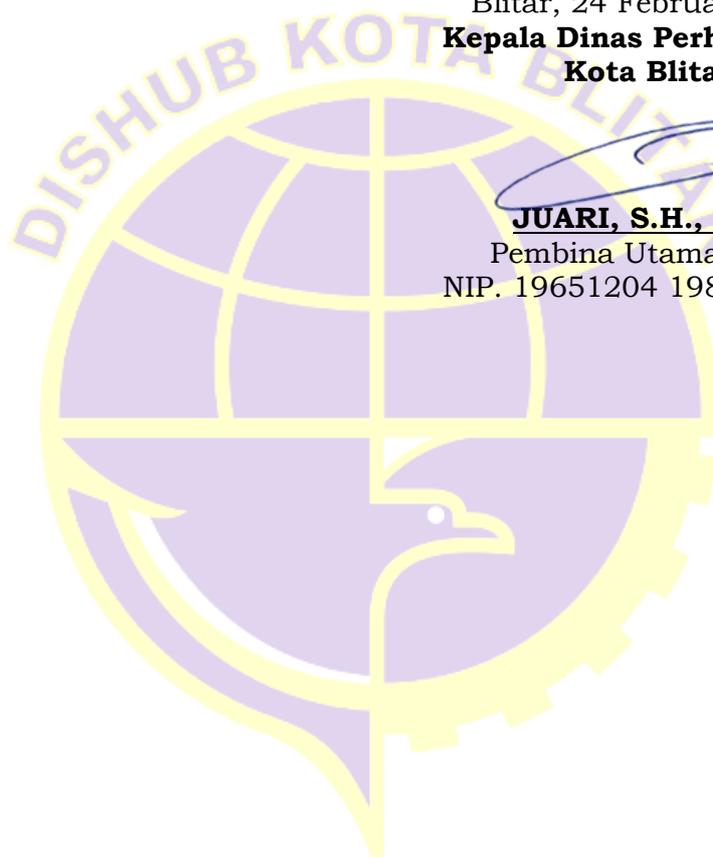
Blitar, 24 Februari 2025

**Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar**

JUARI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651204 198603 1006



Lampiran-lampiran

- I. Matrik Rencana Strategi OPD Tahun 2021-2026
- II. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024
- III. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- IV. Pengukuran Kinerja Tahun 2024



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat
MISI 4 : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal 2020	Target 2024	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal 2020	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya kualitas perhubungan	Level Of Service (LOS)	v/c ratio kinerja ruas jalan	B 0,22	B 0,440	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	99,35%	95%	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal	
											Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai	
										Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	
										Peningkatan keselamatan dan sarana prasarana uji kendaraan yang memadai	Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	
Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan					Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap	Baik 80,11	Baik 81,14	Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Optimalisasi layanan angkutan sekolah	
											Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT	
											Optimalisasi pengelolaan parkir	
Meningkatnya keselamatan transportasi					Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	443 kejadian	390 kejadian	Optimalisasi layanan keselamatan berlalulintas	Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas	
											Penertiban pelanggaran lalu lintas	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	A 84,79	A 85,10	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Perhubungan pada tahun N	A 84,79	A 85,10	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	
											Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja	

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR**



JUARI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 198603 1 006

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (PERUBAHAN)
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR TAHUN 2024**

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 85,93	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	baik (86,17)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 dokumen	4.879.500,00
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	9.156.000,00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 orang/bulan	5.343.838.529,00
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	17 laporan	1.557.600,00
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 paket	244.211.841,64
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 orang	145.477.000,00
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	7.495.300,00
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	12.024.100,00
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 paket	13.525.980,00
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket	57.070.000,00
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	7.900.000,00
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 dokumen	7.800.000,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN						
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU			
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 laporan	257.586.000,00			
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	7.035.600,00			
										Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	30.780.100,00			
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	269.988.000,00
													Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan	442.379.600,00
										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 unit	359.572.800,00
													Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 unit	25.065.000,00
													Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	74.097.600,00
													Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	20.100.000,00
							2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	95,75%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	99,55%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	2 jenis
										Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	8 unit	39.062.200,00			
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah prasarana jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	6042 unit	7.330.424.500,00			
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara	29 unit	382.500.000,00			

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
					Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	96,97%	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	15 jenis	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 unit	59.979.400,00
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 unit	50.000.000,00
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	390 kejadian	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	0,31	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	2 kajian	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	12 laporan	2.084.425.600,00
										Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 dokumen	99.607.700,00
										Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	9 dokumen	3.206.376.000,00
										Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi	1 laporan	86.092.700,00
4	Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Baik (84,98)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	87,92 Baik	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	95,92%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota yang tersedia	9 unit	535.588.800,00
										Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam satu daerah Kabupaten/Kota	12 laporan	1.009.726.600,00
					IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	84,26 Baik	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	95,50%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor yang terdaftar	4.500 unit	47.958.950,00
										Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	1.000 dokumen	25.000.000,00

NO	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	PAGU
										Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang terpelihara	11 unit	362.155.118,00
				IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	82,75 Baik		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	78,00%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	12 laporan	1.696.687.604,00
TOTAL ANGGARAN												26.989.040.830,00	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA BLITAR

JUARI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19651204 198603 1006

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUARI, S.H., M.Si.**
Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BLITAR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Level of Service (LOS)	0.25(Nilai)
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	95.75(%)
3	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	390.00(Kejadian)
4	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan masyarakat layanan perhubungan	84.98(Nilai)
5	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.93(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	19,647,500,279.36	Insentif Fiskal, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,341,540,550.64	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Insentif Fiskal, Pendapatan Bagi Hasil
Total:		26,989,040,830.00	

Wakil Kota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 23 September 2024
Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar
Kota Blitar,

JUARI, S.H., M.Si
NIP. 19651204 198603 1 006

PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkar Daerah : Dinas Perhubungan Kota Blitar
Tahun : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Ket.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas perhubungan	Level of Service (LoS)	Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	B 0,259	B 0,283	90,94	nilai rata-rata v/c rasio kinerja ruas jalan mencapai 0,283 dari target 0,259. Pada angka ini bahwa karakteristik Kota Blitar: Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan. Semakin kecil nilainya maka tingkat kelancaran arus lalu lintas semakin baik.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	19.647.500.279,36	16.572.291.680,00	84,35	Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar 84,35% dari pagu yang ditetapkan
2	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	95,75%	95,32%	99,55	- Persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik sebesar 97,42%. - Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik sebesar 94,85% - Persentase fasilitas keselamatan dalam kondisi baik sebesar 94,26% - Persentase sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik sebesar 94,74% Sehingga sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik pada tahun 2024 mencapai 95,32% dari target 95,75% dengan tingkat Capaian sebesar 99,55%.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.493.881.207,36	10.351.584.376,00	98,64	Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar 98,64% dari pagu yang ditetapkan
3	Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	84,98 Baik	88,87 Baik	104,58	Hasil IKM diambil dari data E-SUKMA Pada sasaran ini, nilai IKM layanan angkutan sekolah gratis adalah 90,92, layanan uji kendaraan bermotor adalah 92,20 sedangkan layanan parkir tepi jalan umum adalah 83,49. Berdasarkan data diatas, maka untuk capaian sasaran ini mencapai 104,58%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.677.117.072,00	3.366.612.052,00	91,56	Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar 91,56% dari pagu yang ditetapkan
4	Meningkatnya keselamatan transportasi	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun berjalan	390 kejadian	164 kejadian	157,95	Total jumlah kecelakaan Tahun 2024 adalah 164 kejadian dari target 390 kejadian. Sehingga tingkat capaian indikator ini mencapai 157,95%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	5.476.502.000,00	2.854.095.252,00	52,12	Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar 52,12% dari pagu yang ditetapkan
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	85,93 A	85,93 A	100,00	Tahap pengukuran kinerja pada Implementasi SAKIP belum optimal, perlu adanya penambahan data dukung capaian kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.341.540.550,64	6.909.534.017,00	94,12	Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran kinerja ini sebesar 94,12% dari pagu yang ditetapkan

Blitar, 05 Februari 2025

**Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar**



JUARI. S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 198603 1 006